HUKUM AYAH MENIKAHI ANAKNYA YANG LAHIR DI LUAR NIKAH

Nurul Asiya Nadhifah

UIN Sunan Ampel | Jl. A. Yani 117 Surabaya
ifa_nadhifah@yahoo.com

Abstract: The positive law in Indonesia in Law no. 1/1974 on Marriage as well as the Compilation of Islamic Law 1991 does not specify whether a girl resulted from illegitimate relationship (outside of wedlock) is allowed to her biological father. The ruling of Constitution Court No. 46/PUU-VIII/2010 has added to the obscurity on the issue. The final ruling clearly abrogates the statement of article 43 of Law of Marriage stating that illegitimate children have civil relationship only with their mother and her family as well as with the man who become biological father as long as it can be scientifically proved which legally valid to have genetic relationship, including with the man's family. The ruling does not necessarily means legalizing parental relationship between children and the man. It only highlights civil relationship, so that it does not have legal impact to allow the two parties to marry each other as it is the opinion of Shafi'i and Maliki schools of law.

Keywords: Marriage of illegitimate children, positive law, Islamic law

Abstrak: Hukum positif di Indonesia belum memberikan kejelasan tentang status anak perempuan yang lahir di luar nikah, apakah boleh dinikahi oleh ayahnya atau tidak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI belum secara tegas mengaturnya. Ketentuan hukum positif tentang pernikahan antara ayah dan anaknya yang dilahirkan di luar nikah semakin samar dengan hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan yang bersifat final ini secara tegas membatalkan kandungan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Putusan tersebut menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga

ayahnya. Putusan tersebut tidak berarti melegalkan hubungan nasab antara keduanya, yang ada adalah hubungan keperdataan antara keduanya bukan hubungan nasab, sehingga tidak mempengaruhi kebolehan seorang ayah menikahi anaknya yang dilahirkan di luar nikah, sebagaimana pendapat Syafi'iyah dan Malikiyyah.

Kata Kunci: Pernikahan, ayah, anak luar nikah.

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keabsahan nikah, di antaranya adalah syarat yang berkaitan dengan calon mempelai, bahwasanya antara calon mempelai tidak boleh memiliki hubungan darah. Hal tersebut dijelaskan dalam QS. al-Nisa' ayat 23:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Nisa': 23)

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa ada wanita-wanita tertentu yang tidak boleh dinikahi. Lebih lanjut, ulama fiqh menggolongkan wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi menjadi tiga kategori, yaitu: dikarenakan ada hubungan kekerabatan atau nasab, dikarenakan adanya hubungan perkawinan (*mushâharah*) dan karena adanya hubungan persusuan (*radhâ'ah*).¹ Wanita yang

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), 110.

termasuk dalam tiga kategori tersebut, haram dinikahi untuk selama-lamanya (*muabbad*).

Hukum positif di Indonesia juga mengatur hal tersebut yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 39. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita tidak boleh dilangsungkan karena ada pertalian nasab, di antaranya:

1. Seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
2. Seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
3. Seorang wanita saudara yang melahirkannya.

Perkawinan juga dilarang ketika ada pertalian kerabat semenda antara kedua calon mempelai, yang meliputi:

1. Seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
2. Seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
3. Seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusny hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qabla al-dukhûl*.
4. Seorang wanita bekas isteri keturunannya.

KHI juga melarang perkawinan jika ada pertalian persusuan antara kedua calon mempelai. Dalam KHI disebutkan kriteria wanita yang masih ada pertalian persusuan, di antaranya:

1. Wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
2. Seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
3. Seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah.
4. Seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
5. Anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Selain tiga macam golongan di atas, hukum Islam juga menyebutkan status anak wanita yang lahir di luar nikah, apakah boleh dinikahi oleh ayahnya atau tidak. Dalam *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu*, Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa ulama

Hanafiyyah dan Hanabilah mengharamkan seorang ayah menikahi anaknya yang dilahirkan di luar nikah. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah (menurut pendapat yang masyhur) membolehkan hal tersebut.²

Hukum positif di Indonesia belum memberikan kejelasan tentang status anak wanita yang lahir di luar nikah, apakah boleh dinikahi oleh ayahnya atau tidak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI belum secara tegas mengaturnya. Memang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 sudah dinyatakan bahwa perkawinan dilarang sebab ada hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas. Ketentuan dalam pasal tersebut lebih cenderung memberikan larangan untuk menikahi seorang wanita yang masih ada hubungan saudara, meskipun juga dapat ditafsirkan sebagai landasan untuk membolehkan seorang ayah menikahi anaknya yang dia lahirkan di luar ikatan pernikahan. Penafsiran seperti itu dapat dilakukan jika memang anak yang dilahirkan di luar nikah dianggap tidak memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya. Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 43 yang menyatakan bahwa: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memang sejalan dengan hukum Islam yang menyatakan bahwa seorang anak yang dilahirkan di luar nikah hanya memiliki nasab kepada ibunya. Namun pandangan peraturan perundangan tersebut hanya sebatas mengenai status anak yang dilahirkan di luar nikah, bukan aturan tentang pernikahan antara ayah dan anaknya yang dilahirkan di luar nikah.

Ketentuan hukum positif tentang pernikahan antara ayah dan anaknya yang dilahirkan di luar nikah semakin samar dengan hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, vol. 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 124.

VIII/2010. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan; kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan yang bersifat final ini secara tegas membatalkan kandungan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, pasal tersebut berbunyi:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Uji materi (*judicial review*) pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh pemohon Aisyah Mochtar dan anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan ini menjadi terobosan besar dalam fiqh pernikahan di Indonesia, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut banyak ditentang oleh masyarakat muslim Indonesia.

Beragam reaksi antara pro dan kontra terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut cukup menarik untuk dikaji ulang. Reaksi penolakan tidak hanya didasari pada undang-undang yang telah berlaku di negara ini, akan tetapi juga dilandaskan pada hukum agama tentang kedudukan anak di luar nikah dan hukum ayahnya menikahi anak tersebut. Sedangkan reaksi yang mendukung terhadap keputusan tersebut di antaranya dilandaskan pada realitas bahwa telah banyak anak yang lahir di luar nikah kemudian menjadi kurang diuntungkan atau bahkan menjadi korban dari penerapan undang-undang dan hukum

agama yang telah diterapkan. Namun terlepas dari itu, hal ini menunjukkan bahwa tidak selamanya hukum positif di Indonesia –terutama yang mengatur tata cara beragama– sejalan dengan hukum Islam.

Putusan revolusioner ini tentu saja tidak hanya berimplikasi pada status anak yang lahir di luar nikah, namun lebih jauh dari itu. Berawal dari putusan ini, artikel ini bermaksud memberikan pandangan hukum positif di Indonesia apabila anak yang dilahirkan di luar nikah dikawini oleh ayah biologisnya.

Penentuan Nasab dalam Hukum Islam

Pengertian nasab secara bahasa diartikan dengan kerabat, keturunan atau menetapkan keturunan. Dalam hukum Islam, asal usul seorang anak (nasab) dapat diketahui dari salah satu di antara tiga sebab, yaitu:

1. Dengan cara *al-firâsy*, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah.
2. Dengan cara *iqrâr*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknnya.
3. Dengan cara *bayyinah*, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang betul anak si fulan. Dalam hal yang terakhir ini termasuk juga anak yang lahir dari *wath' syubhat* dan anak yang lahir dari nikah *fâsid*.

Dalam hukum Islam, anak dibagi kepada dua bagian, yaitu anak yang diketahui hubungan darah dengan bapaknya dan anak yang tidak diketahui hubungan darah dengan bapaknya. Anak yang tidak diketahui hubungan darah dengan bapaknya dengan sendiri mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya yang melahirkannya dan bisa mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya, jika bapaknya itu mengakuinya.³

³ Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), 182.

Terjadi perbedaan yang prinsip tentang motivasi pengakuan anak menurut hukum Islam. Dalam hukum perdata Barat, pengakuan anak dapat dilakukan oleh seseorang yang merupakan kebutuhan hukum bagi pasangan yang hidup bersama tanpa nikah, sedangkan motivasi pengakuan anak menurut hukum Islam adalah⁴:

- a. Demi kemaslahatan anak yang diakui.
- b. Rasa tanggung jawab dan *taklîf ijtimâ'iy*.
- c. Menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir di luar kawin orang tuanya.
- d. Antisipasi terhadap datangnya *mudharat* yang lebih besar di masa yang akan datang apabila anak tersebut tidak diakui.

Hukum Islam hanya memberikan akibat hukum kepada anak dengan orang tua berdasarkan pernikahan, tetapi untuk menutupi aibnya, syariat Islam menganjurkan agar orang mengakui anak yang jelas ayahnya. Syarat penetapan/penghubungan nasab dan keturunan adalah:

- a. Kandungan tersebut masih dalam status perkawinan yang sah di antara suami dan isteri.
- b. Masa kandungan tidak kurang dari enam bulan dan tidak lebih dari empat tahun menurut jumbuh ulama dan dua tahun menurut Abu Hanifah atau lima tahun menurut Imam Malik.
- c. Terjadi senggama yang hakiki di antara suami isteri, kecuali pendapat Abu Hanifah: Akad yang sah saja sudah cukup untuk menghubungkan nasab/keturunan
- d. Nasab/keturunan dapat dihubungkan kepada suami, apabila ia tidak menafikan/menolak nasab anak tersebut.⁵

⁴ *Ibid.*

⁵ Hamdan Abbas, *Peminjaman Rahim untuk Kandungan Bayi Ditinjau dari Segi Islam*, (Medan: Universitas Washliyah, 1987), 81.

Pengertian Anak Luar Nikah

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin luar nikah.⁶ Dalam Hukum Islam anak yang dapat dianggap anak di luar nikah adalah:

- 1) Anak zina, adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan, karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.
- 2) Anak *mulâ'annah*, adalah anak yang dilahirkan oleh seorang isteri yang mana keberadaan anak itu dibantah oleh suami sebagai anaknya dan menuduh isterinya telah berbuat zina dengan pria lain dengan cara melakukan sumpah li'an terhadap isterinya.
- 3) Anak syubhat, adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang digauli dengan cara syubhat, yang dimaksud dengan syubhat dalam hal ini adalah seorang laki-laki menggauli seorang wanita yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu.⁷

Mengenai status anak luar nikah, baik di dalam hukum nasional maupun hukum Islam bahwa anak itu hanya dibangsakan pada ibunya, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁸ Maka hal ini berakibat pula pada hilangnya kewajiban tanggung jawab ayah kepada anak dan hilangnya hak anak kepada ayah. Di dalam hukum Islam, dewasa dilihat sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Apabila tanda-tanda ini tidak kelihatan, maka seorang anak dianggap telah dewasa apabila telah mencapai usia 15 tahun. Dari Ibnu Umar menyebutkan yang artinya:

“Rasulullah saw memeriksaku ketika hendak berangkat perang Uhud. Ketika itu aku baru berusia 14 tahun. Beliau tidak

⁶ Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, 202.

⁷ Huzaemah Tahido, *Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Kowani, 1996), 2.

⁸ Lihat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

mbolehkanku pergi berperang. Ketika hendak berangkat ke medan perang Khandak beliau memeriksaku pula. Ketika itu aku telah berusia 15 tahun, dan beliau membolehkanku ikut perang. Kata Nafi' maka kudatangi Umar Bin Abdul Aziz, ketika itu ia telah menjadi Khalifah. Lalu kusampaikan kepadanya hadis tersebut. Katanya sesungguhnya itu adalah batas antara usia kecil dan dewasa. Lalu dia tulis surat kepada seluruh pegawainya supaya mereka mewajibkan pelaksanaan tugas-tugas agama (*mukallaḥ*) bagi setiap anak yang telah mencapai usia 15 tahun. Anak yang kurang dari usia tersebut menjadi tanggungan orang tuanya".⁹

Hukum Ayah Menikahi Anaknya yang Lahir di Luar Nikah dalam Hukum Islam

Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama mazhab tentang hukum seorang ayah menikahi anaknya yang dilahirkan dari zina bersama seorang wanita. Pendapat pertama, yang diwakili golongan Hanabilah dan Hanafiyyah mengatakan bahwa seorang lelaki dilarang menikahi anaknya yang dihasilkan dari zina. Pendapat tersebut merupakan implikasi dari pendapat mereka yang menyatakan bahwa keharaman menikah sebab *mushāharah* dapat ditetapkan akibat melakukan zina.¹⁰

Ulama dari golongan Hanabilah dan Hanafiyyah mendasarkan pendapat dengan hadits:

"Bahwa seorang lelaki berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina dengan seorang perempuan di zaman jahiliyyah, apakah aku boleh menikahi anaknya? Rasulullah menjawab: Aku tidak memandang hal tersebut, tidaklah pantas jika seorang wanita yang muncul dari anaknya (ibu dari anak tersebut) untuk dinikahi atas sesuatu yang lahir darinya."¹¹

⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, terjemah Ma'mur Daud, Hadis Nomor 1829, Jilid IV, (Jakarta: Wijaya, 1993), 33.

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmiyy wa Adillatuhu*, vol. 9, 124.

¹¹ Ibid., 123. Hadis tersebut dikomentari oleh Wahbah Zuhaili bahwa merupakan hadis *mursal* dan *munqathi'*, seperti yang diungkapkan oleh Ibnu al-Hammam dalam *Fath al-Qadir*.

Sedangkan ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Malikiyyah menyatakan sebaliknya, bahwa seseorang boleh menikahi anak perempuannya yang dilahirkan dari hubungan zina. Sebab menurut mereka perbuatan zina tidak bisa menetapkan hubungan *mushâharah*.¹²

Ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah mendasarkan pendapat mereka dengan hadis:

“Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah pernah ditanya tentang seorang lelaki yang menggauli perempuan secara haram (zina), apakah baginya boleh menikahi anak perempuannya, dan tentang seorang lelaki yang menggauli anak wanita secara haram (zina), apakah baginya boleh menikahi ibunya? Aisyah berkata: Rasulullah saw menjawab: Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal. Sesungguhnya (hal tersebut) mengharamkan sesuatu yang dinikahi dengan cara yang halal.¹³

Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap Seorang Ayah Menikahi Anaknya yang Lahir di Luar Nikah

Salah satu acuan bagi hukum pernikahan di Indonesia adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 1991 berupa Kompilasi Hukum Islam atau yang disingkat KHI. Dalam KHI sudah diatur jelas tentang anak yang dilahirkan di luar kawin, yaitu mulai pasal 99 sampai pasal 103. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan merupakan hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Status anak yang dilahirkan di luar nikah dijelaskan dalam pasal 100, yang berbunyi, “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Namun secara eksplisit KHI, belum mengatur lebih lanjut tentang apakah anak yang dilahirkan di luar nikah tersebut. Sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah dia termasuk

¹² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu*, vol. 9, 124.

¹³ Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, vol.4 (Makkah: Maktabah Dar Al-Baz, 1994), 169.

seseorang yang diharamkan untuk dinikahi oleh ayahnya dan keluarga ayahnya –mengingat secara nasab syar'i, antara keduanya tidak ada hubungan nasab? Ataukah memang anak wanita tersebut halal dinikahi oleh ayah biologisnya? Persoalaan seperti ini yang belum dijawab oleh KHI.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam memang sudah diatur secara tersendiri tentang larangan kawin dalam bab VI, pasal 39 sampai pasal 44. Dalam pasal-pasal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- 1) Karena pertalian nasab:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- 2) Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
 - b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
 - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qabla al-dukhûl*.
 - d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- 3) Karena pertalian sesusuan:
 - a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah.

- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
- e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya:
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya.
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam:

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:

- a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
 - b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba`da dukhûl* dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam:

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam tentang batalnya perkawinan juga disinggung tentang kriteria orang yang haram dinikahi, sehingga menyebabkan dapat dibatalkannya sebuah perkawinan.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Dari ketentuan KHI dalam Bab VI tentang Larangan Kawin di atas, tidak disinggung secara jelas tentang boleh atau tidaknya seorang ayah menikahi anaknya yang dilahirkan di luar nikah. Dalam bab VI tersebut hanya disebutkan tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi sesuai dengan yang disebutkan secara jelas di dalam al-Qur'an dan hadis, baik yang diharamkan akibat

adanya hubungan nasab antara keduanya, hubungan persusuan ataupun akibat hubungan kerabat semenda.

Sebenarnya dari ketentuan KHI pasal 39, status seorang ayah menikahi anaknya yang dilahirkan di luar nikah dapat diambil kesimpulan hukumnya. Apabila memang anak yang lahir di luar nikah disimpulkan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya (Kompilasi Hukum Islam Pasal 100), maka dari pasal 39 sudah dapat diambil kesimpulan tentang status ayahnya menikahi anak tersebut, yaitu ayah tersebut sah dan diperbolehkan untuk menikahi anaknya yang dilahirkan di luar nikah, sebab anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, sehingga tidak tergolong dalam wanita-wanita yang diharakamkan untuk dinikahi dikarenakan ada hubungan nasab. Hal ini mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 dan Pasal 39.

Tinjauan Undang-Undang 1974 terhadap Seorang Ayah Menikahi Anaknya yang Lahir di Luar Nikah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan undang-undang tentang perkawinan yang menjadi sumber utama dalam hukum di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut juga disinggung tentang kedudukan anak, baik anak sah maupun tidak. Ketentuan tentang anak sah dijelaskan pada pasal 42, yang berbunyi: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Selanjutnya pada pasal 43, dijelaskan tentang kedudukan anak yang tidak sah, yaitu: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah."

Ketentuan tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Tentang status anak yang dilahirkan di luar nikah, keduanya sama-sama mengatakan bahwa anak tersebut bukanlah anak sah, sehingga hanya memiliki

hubungan nasab atau perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur beberapa perkawinan yang dilarang. Ada beberapa pasal yang mengatur tentang hal tersebut:

Pasal 8:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
6. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Jika dalam ketentuan pasal 43 Undang-Undang 1974 ditentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya, tidak dengan ayahnya atau keluarga ayahnya, maka menurut Undang-Undang 1974, anak yang dilahirkan di luar nikah dapat disimpulkan, boleh dinikahi oleh ayah biologisnya. Sebab dalam pasal 8, hanya disebutkan tentang larangan pernikahan antara dua orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas. Sedangkan anak di luar nikah tidak termasuk golongan yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.

Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Kebolehan Ayah Menikahi Anaknya yang Lahir di Luar Nikah.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan yang bersifat final ini secara tegas membatalkan kandungan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, pasal tersebut dihapus, sehingga berbunyi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan

dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Uji materi (*judicial review*) pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh pemohon Aisyah Mochtar dan anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan ini menjadi terobosan besar dalam fiqh pernikahan di Indonesia, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut banyak ditentang oleh masyarakat muslim Indonesia.

Pasca Putusan tersebut, terjadi perubahan yang mendasar dalam hukum perkawinan di Indonesia. Yang mulanya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seorang anak yang dilahirkan di luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka pasca putusan tersebut, anak yang dilahirkan di luar nikah juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya, sepanjang dapat dibuktikan dengan teknologi.

Tujuan dari MK adalah untuk menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Menurut pertimbangan MK, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan.

Penting untuk dicatat bahwa putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak menyebut soal akta kelahiran anak luar kawin maupun akibat hukum putusan tersebut terhadap akta kelahiran anak luar kawin. Implikasi putusan MK ini berkaitan dengan status hukum dan pembuktian asal usul anak luar kawin. Hubungannya dengan akta kelahiran adalah karena pembuktian asal-usul anak hanya dapat dilakukan dengan akta kelahiran

otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU Perkawinan.¹⁴

Mengenai konsekuensi hukum dengan dikeluarkannya suatu akta kelahiran terhadap anak luar kawin ialah di dalam akta kelahiran anak tersebut hanya tercantum nama ibunya. Karena pada saat pembuatan akta kelahiran, status sang anak masih sebagai anak luar kawin yang hanya diakui memiliki hubungan darah dan hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Dalam akta kelahiran anak luar kawin tercantum bahwa telah dilahirkan seorang anak dengan tercantum nama, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu (menyebut nama ibu saja, tidak menyebut nama ayah si anak). Demikian ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf a PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dengan adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Putusan MK membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subyek hukum yang harus bertanggungjawab terhadap anak luar kawin untuk bertindak sebagai bapaknya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dan/atau hukum.

Dengan kata lain, setidaknya ada dua cara untuk dapat menjadikan sang anak luar kawin memiliki hubungan darah dan juga hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, yaitu;

1. Pengakuan oleh sang ayah biologis; atau
2. Pengesahan oleh sang ayah biologis terhadap anak luar kawin tersebut.

¹⁴ Try Indriadi, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/tt4f7ae93da9a23/hubungan-perdata-anak-luar-kawin-dengan-ayahnya-pasca-putusan-mk>. Diakses 15 Desember 2014.

Putusan MK hanya menguatkan kedudukan ibu dari si anak luar kawin dalam memintakan pengakuan terhadap ayah biologis dari si anak luar kawin tersebut, apabila si ayah tidak mau melakukan pengakuan secara sukarela terhadap anak luar kawin. Dengan diakuinya anak luar kawin oleh ayah biologisnya, maka pada saat itulah timbul hubungan perdata dengan si ayah biologis dan keluarga ayahnya. Dengan demikian, setelah adanya proses pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut, maka anak luar kawin tersebut telahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayahnya sebagaimana diatur Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer") yang berbunyi: "Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, telahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya."

Yang sedikit menjadi permasalahan dalam putusan tersebut adalah cara pemaknaan tentang hubungan keperdataan. Apakah hubungan keperdataan yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sama dengan hubungan nasab dalam Islam?

Menurut Lailatu Arofah, wakil ketua Pengadilan Agama Tabanan, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 hanya dikenal anak yang sah (anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, vide pasal 42) dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan (vide pasal 43), maka anak di luar perkawinan berarti lawan dari anak yang sah yakni anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Penafsiran tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa putusan MK sebagaimana tersebut adalah putusan yang menguji materi pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka penafsiran terhadap putusan tersebut harus kembali pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.¹⁵

¹⁵Lailatul Arofah, Menafsirkan Hubungan Perdata Dalam Uji Materi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/1974 di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 /PUU-VIII/2010, www.pa-tabanan.go.id/sys-content/.../artikel%20hub%20perdata.doc, diakses 15 Desember 2014.

Oleh karena anak di luar nikah dalam putusan MK tidak bisa ditafsirkan dengan makna yang berbeda dengan maksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka agar putusan tersebut tidak bertentangan dengan pandangan mayoritas ulama, termasuk fatwa MUI, menurut pandangan penulis, yang dapat dilakukan adalah membedakan dan mempersempit “makna hubungan perdata” dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya (teks putusan MK). “hubungan perdata” dalam hal ini (bagi ummat Islam) harus dibedakan dengan hubungan perdata dalam pengertian yang umum.

Wakil Ketua MK Ahmad Shodiqi dalam *Sitinjau News* 12 Mei 2012, menjelaskan hak/hubungan perdata adalah hubungan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dengan orang lain, sementara itu dalam putusan MK tidak diuraikan secara eksplisit batasan hubungan perdata yang dimaksud, sehingga sebagian masyarakat sangat jauh berharap agar putusan MK benar-benar menghilangkan perlakuan diskriminasi hukum yang dialami oleh anak di luar nikah, yang pada gilirannya menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat.

Secara garis besar hak dan kewajiban perdata yang timbul akibat lahirnya seorang anak antara lain:

1. Seorang perempuan yang melahirkan, secara otomatis menjadi ibu dari anak yang dilahirkan (ketentuan umum)
2. Anak mempunyai hak untuk dinasabkan pada ayahnya (khusus dalam ketentuan hukum Islam)
3. Ayah mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya (ketentuan umum)
4. Ada hubungan saling mewarisi antara anak dengan kedua orang tuanya (ketentuan umum)

5. Ayah kandung memiliki hak sekaligus kewajiban untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuannya (khusus dalam ketentuan hukum Islam)

Dengan demikian, untuk penerapan terhadap ummat Islam Indonesia “hubungan perdata” (anak di luar nikah terhadap ayah) sebagaimana tersebut di atas harus dibedakan sebagai berikut:

1. Untuk anak yang terbukti terlahir sebagai akibat dari pernikahan sirri yang sah secara syar’i, maka hubungan perdata dapat dimaknai secara umum, sehingga anak bisa dinasabkan pada ayahnya, bisa terjadi hubungan saling mewarisi, berlaku pula ketentuan wali nikah serta kewajiban pemberian nafkah.
2. Untuk anak yang terlahir sebagai akibat perzinahan, maka “hubungan perdata” harus dimaknai secara khusus, yakni terbatas pada adanya kewajiban perdata untuk memberikan nafkah atau memenuhi segala kebutuhan hidup anak tersebut sampai dewasa dan bisa berdiri sendiri.

Pengklasifikasian dan penyempitan makna “hubungan perdata” sebagaimana tersebut di atas dapat mengompromikan tujuan putusan MK dengan pandangan mayoritas ulama, karena apabila anak dari pernikahan sirri memiliki hubungan perdata secara penuh pada ayahnya tentu hal ini tidak bertentangan, bahkan sejalan dengan pandangan para fuqaha. Sedangkan untuk anak dari perzinahan, kalau ayah biologisnya (yang telah terbukti di Pengadilan Agama mempunyai hubungan darah melalui gugatan asal usul anak) dibebani kewajiban memberikan nafkah atau memenuhi segala kebutuhan hidup anak hasil perzinahannya hingga dewasa atau bisa berdiri sendiri, tentunya juga tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena salah satu prinsip dalam hukum Islam adalah bahwa semua orang mukallaf (aqil, baligh) harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Penafsiran semacam ini juga tidak bertentangan dengan asas-asas hukum, karena apabila terjadi konflik norma, maka ada tiga asas yang dapat diterapkan:

1. Asas *Lex specialist derogat legi generali* (ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum)
2. Asas *Lex Superior derogat legi inferiori* (ketentuan yang lebih tinggi mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah)
3. Asas *Lex Posterior derogat legi priori* (ketentuan yang datang kemudian mengesampingkan ketentuan yang lebih dulu)

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, baik yang Muslim maupun non Muslim, maka makna "hubungan perdata" dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya (putusan MK) dapat ditafsirkan sesuai hukum masing-masing agamanya dengan menempatkan ketentuan dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut sebagai ketentuan umum dan menempatkan hukum masing-masing agama sebagai ketentuan khusus, sehingga hal ini sejalan dengan asas *Lex specialist derogat legi generali* (ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum).

Berdasarkan hal di atas, meskipun sudah lahir putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, bukan berarti putusan tersebut melegalkan hubungan nasab antara keduanya. Yang ada adalah hubungan keperdataan antara keduanya bukan hubungan nasab.

Maka dari itu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak mempengaruhi kebolehan seorang ayah menikahi anaknya yang dilahirkan di luar nikah. Keduanya tetap boleh menikah, sebab memang tidak ada hubungan nasab, namun

di antara keduanya juga ada hak-hak dan kewajiban keperdataan yang harus dipenuhi, sebagai konsekuensi adanya hubungan keperdataan antara keduanya.

Penutup

Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mazhab tentang hukum seorang ayah menikahi anaknya yang dilahirkan dari zina bersama seorang wanita. Pendapat pertama, yang diwakili golongan Hanabilah dan Hanafiyyah mengatakan bahwa, seorang lelaki dilarang menikahi anaknya yang dihasilkan dari zina. Pendapat tersebut merupakan implikasi dari pendapat mereka yang menyatakan bahwa keharaman menikah sebab *mushâharah* dapat ditetapkan akibat melakukan zina. Pendapat kedua, anak perempuan hasil perzinaan itu bisa dikawini oleh ayah biologisnya, karena secara syar'i mereka tidak memiliki hubungan nasab. Di antara yang berpendapat seperti itu adalah ulama dari kalangan Malikiyyah dan Syafi'iyah.

Meskipun sudah lahir putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, bukan berarti putusan tersebut melegalkan hubungan nasab antara keduanya, yang ada adalah hubungan keperdataan antara keduanya bukan hubungan nasab.

Maka dari itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak pula mempengaruhi kebolehan seorang ayah menikahi anaknya yang dilahirkan di luar nikah. Keduanya tetap boleh menikah, sebab memang tidak ada hubungan nasab. Namun di antara keduanya juga ada hak-hak dan kewajiban keperdataan yang harus dipenuhi, sebagai konsekuensi adanya hubungan keperdataan antara keduanya.

Daftar Pustaka

- Abbas, Hamdan. *Peminjaman Rahim untuk Kandungan Bayi Ditinjau dari Segi Islam*. Medan: Universitas Washliyah, 1987.
- Arofah, Lailatul. *Menafsirkan Hubungan Perdata Dalam Uji Materi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/1974 di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 /PUU-VIII/2010*, www.patabanan.go.id/sys-content/.../artikel%20hub%20perdata.doc, Diakses 15 Desember 2014.
- Baihaqi (al-). *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*. Vol.4. Makkah: Maktabah Dar Al-Baz, 1994.
- Indriadi, Try. Hubungan Perdata Anak Luar Kawin dengan Ayahnya Pasca Putusan MK. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7ae93da9a23/hubungan-perdata-anak-luar-kawin-dengan-ayahnya-pasca-putusan-mk>. Diakses 15 Desember 2014.
- Jauhari, Iman. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003.
- . *Kapita Selekta Hukum Islam*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2007.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Terjemah Ma'mur daud. Hadits Nomor 1829. Jilid IV. Jakarta: Wijaya, 1993.
- Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Tahido, Huzaemah. *Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Kowani, 1996.
- Taufiq. *Pengakuan Anak Wajar Menurut Hukum Perdata Tertulis dan Hukum Islam*. Jakarta: Dirbinbaperais Depag RI, 1995.

Nurul Asiya Nadhifah

Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012.

Zuhaili (al-), Wahbah. *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu*. Vol. 9, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.